

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur (Studi Kasus Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggintang Tahun 2024)

Ignasia Sriyanthi Surat Doni¹, Nursalam², Aspri Budi Oktavianto³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Juli 15, 2026 Revised Juli 15, 2026 Accepted Juli 15, 2026 Kata Kunci: Peran BPBD, Penanggulangan Bencana, Erupsi Gunung Berapi Keywords: Role BPBD, Disaster Management, Volcano Eruption	Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, berlokasi di BPBD Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan berdasarkan tiga indikator yang mengacu pada Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang prinsip, tugas, dan fungsi BPBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD mencakup tiga tahapan manajemen bencana. Pertama, tahap mitigasi menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kebencanaan Bersama dengan Lembaga Chatolic Relief Service (CRS), meskipun jangkauannya belum menyeluruh dan infrastruktur sistem peringatan dini masih perlu ditingkatkan. Kedua, tahap tanggap darurat berjalan secara efektif berkat koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan pihak eksternal. Ketiga, tahap pemulihan telah dilaksanakan secara memadai, namun masih terkendala oleh resistensi sebagian masyarakat terhadap program relokasi ke hunian sementara. ABSTRACT <i>This study aims to analyze and describe the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of East Flores Regency in managing the eruption disaster of Lewotobi Laki-laki Volcano, as well as to identify the inhibiting factors encountered in its implementation. This research employs a qualitative approach with a case study method, conducted at the BPBD of East Flores Regency, East Nusa Tenggara Province. The analysis is based on three indicators referring to the East Flores Regent Regulation Number 39 of 2022 and Law Number 24 of 2007 concerning the principles, duties, and functions of BPBD. The findings indicate that the role of BPBD encompasses three stages of disaster management. First, the mitigation stage reveals that BPBD has effectively conducted disaster socialization and training activities, although community coverage remains incomplete and early warning system infrastructure requires further improvement. Second, the emergency response stage was carried out effectively through cross-sector coordination involving various government agencies and external parties. Third, the recovery stage has been implemented adequately; however, it remains constrained by resistance from some community members toward the temporary relocation program.</i> <i>This is an open access article under the CC BY license</i>



Corresponding Author:

Ignasia Sriyanthi Surat Doni
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana
Kupang, Indonesia
Email: ignasiasriyanthi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) yang menjadikannya sangat rentan terhadap bencana alam, khususnya letusan gunung berapi [11]. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama yang menyebabkan terbentuknya deretan gunung api aktif dalam jumlah besar, yaitu sekitar 129 gunung api aktif atau sekitar 13% dari total gunung api aktif di dunia [10]. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada risiko tinggi terhadap berbagai bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian sosial dan ekonomi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Erupsi gunung api merupakan proses keluarnya magma, gas, dan material vulkanik ke permukaan bumi akibat tekanan yang melebihi kekuatan batuan penutup [1]. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa bahaya utama seperti awan panas, lava, hujan abu, dan gas beracun, tetapi juga bahaya ikutan seperti banjir lahar dingin yang terjadi pascaerupsi [12]. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap erupsi gunung api, dengan 17 gunung api aktif yang tersebar di berbagai wilayah (BPS Provinsi NTT). Salah satu gunung yang menjadi perhatian adalah Gunung Lewotobi Laki-laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, yang aktivitas vulkaniknya meningkat signifikan sejak awal tahun 2024.

Pada 03 November 2024, Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi eksplosif besar yang terjadi pada pukul 23.57 WITA saat masyarakat sedang terlelap. Tidak adanya peringatan dini mengakibatkan 9 korban meninggal dan 64 luka-luka akibat material piroklastik, serta berdampak pada rusaknya 7 sekolah, 23 rumah rusak berat, dan 9.772 jiwa terdampak (Pusat Data, Informasi dan Komunikasi BNPB, 2024). Kecamatan Wulanggintang menjadi kawasan yang terkena dampak paling serius, mencakup empat desa yaitu Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Nawakote, dan Desa Boru. Data sebaran pengungsi pada 9 November 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Terdampak Erupsi Gunung Berapi Lewotobi Laki-laki yang berada di Pengungsian pada 9 November 2024

No.	Tempat Evakuasi	Jumlah (KK)	Pengungsian (Orang)
1	Posko Konga	363	756
2	Posko Bokang Wolomatang	190	529
3	Posko Lewolaga	355	1.191
4	Posko Eputobi	359	1.031
5	Posko Kobasoma	200	728
6	Posko Ile Gerong	62	183
7	Pengungsian Mandiri	1.446	5.331
Jumlah		2.975	9.772

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1, total pengungsi terdampak bencana akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki tercatat sebanyak 2.975 KK dengan total 9.772 orang yang tersebar di enam posko

pengungsian dan pengungsian mandiri. Pengungsian mandiri mencatat jumlah terbesar yakni 1.446 KK dengan 5.331 jiwa, menunjukkan bahwa sebagian besar warga terdampak memilih mencari perlindungan secara mandiri di luar posko yang disediakan pemerintah.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang yang tercantum dalam UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 5 yang berbunyi "*pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana*". Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjalankan tugas tersebut di tingkat kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berpedoman pada kebijakan yang disahkan oleh BNPB [10].

BPBD Kabupaten Flores Timur memiliki peran penting dalam penanganan dan pencegahan bencana, khususnya melalui penyediaan sistem peringatan dini (*Early Warning System*). Namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terdampak, pelaksanaan tugas BPBD dinilai belum optimal. Masyarakat menyatakan tidak adanya informasi peringatan dini maupun arahan evakuasi sebelum erupsi terjadi, sehingga menimbulkan kepanikan yang diperparah oleh kondisi malam hari, cuaca buruk, dan pemadaman listrik. Keterbatasan infrastruktur seperti tidak tersedianya sirine menyebabkan masyarakat lebih bergantung pada informasi dari media sosial dan pengumuman desa. Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam koordinasi, respons, serta penyediaan infrastruktur mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten Flores Timur, sehingga penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran BPBD Kabupaten Flores Timur serta faktor penghambat dan pendukungnya dalam penanganan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki Tahun 2024.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memahami peran BPBD Kabupaten Flores Timur dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki secara mendalam dan holistik [2]. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder [3].

1. Data primer diperoleh langsung melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan informan dari unsur BPBD Kabupaten Flores Timur, kepala desa, serta masyarakat terdampak di Desa Hokeng, Klatanlo, Nawakote, dan Boru.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi, laporan kebencanaan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan.

Pengambilan data dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025 di Kantor BPBD Kabupaten Flores Timur dan Kecamatan Wulanggitang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, mencakup aparatur BPBD, pemerintah desa, dan masyarakat terdampak. Penentuan sampel dilakukan melalui dua teknik. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan dari unsur kelembagaan berdasarkan kapasitas dan keterlibatan langsung dalam penanggulangan bencana, meliputi pejabat BPBD dan kepala desa [8]. Teknik *snowball sampling* diterapkan untuk menjangkau informan dari unsur masyarakat sebanyak 32 orang yang tersebar di empat desa terdampak [8].

Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif naratif yang disusun berdasarkan kategorisasi temuan lapangan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif [6] yang mencakup empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi Kesimpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan pada bagian ini menguraikan penyajian data penyajian data yang peneliti temukan di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang di gunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini

“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur (Studi Kasus Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kecamatan Wulanggintang Tahun 2024)” berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Flores Timur, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Bencana melalui 3 tahapan sebagai berikut:

1. Mitigasi, yang terdiri dari: sosialisasi, pelatihan, infrastruktur
2. Tanggap Darurat, yang terdiri dari: koordinasi evakuasi dan logistic darurat
3. Pemulihan, yang terdiri dari: rehabilitasi dan rekonstruksi

3.1 Mitigasi

Mitigasi Bencana menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui Pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

3.1.1 Sosialisasi

Sosialisasi penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya penyampaian informasi yang bertujuan mengenalkan ancaman bencana, meningkatkan kesadaran, serta membentuk sikap dan perilaku kesiapsiagaan masyarakat. BPBD Kabupaten Flores Timur melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk mitigasi non-struktural untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Bergmans Polen Hayon selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat di sekitar gunung memahami potensi bencana, mengenali status gunung, zona rawan, serta jalur evakuasi yang harus digunakan saat terjadi erupsi.

Pelaksanaan sosialisasi tidak hanya di lakukan di masyarakat tapi juga di lingkungan sekolah yang dilakukan secara kolaboratif bersama petugas pengamatan gunung api (PGA), sehingga informasi yang disampaikan bersifat langsung dan faktual. Sosialisasi ke sekolah dilakukan sebagai bagian dari upaya edukasi kebencanaan kepada generasi muda. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan kepada siswa tetapi juga memiliki pemahaman yang baik dan cenderung lebih siap Ketika terjadi bencana



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan oleh BPBD Bersama Petugas PGA Kepada Siswa Di SMA, Kecamatan Wulanggintang

Sumber: Dokumen SMA PGRI Gelekat Lewo Boru, 2025

Sosialisasi di masyarakat tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat secara langsung, melainkan difokuskan kepada anggota Kampung Siaga Bencana (KSB) yang dibentuk melalui kerja

sama dengan lembaga Catholic Relief Services (CRS). Kerja sama dengan CRS dilakukan untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendampingan, penyediaan materi edukasi, dan metode sosialisasi yang lebih partisipatif. Pembentukan KSB melibatkan aparat desa, ketua RT, Kepala dusun. KSB beranggotakan sekitar 25 orang yang terdiri dari aparat desa, seperti ketua RT dan kepala dusun, yang selanjutnya bertugas meneruskan informasi kebencanaan kepada masyarakat luas. Keberadaan KSB dinilai efektif dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dan mempercepat penyebaran informasi terkait tanda-tanda bencana serta prosedur evakuasi.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi oleh CRS kepada anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB)
Sumber: Dokumen Kampung Siaga Bencana, 2024

Selain sosialisasi oleh BPBD, masyarakat Desa Nawakote juga menerima sosialisasi dari pihak kehutanan terkait pengelolaan lahan pertanian dan pelestarian hutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ignasius Puka selaku Sekretaris Desa Nawakote, sosialisasi tersebut menekankan pentingnya menjaga kawasan hutan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat memperbesar Risiko banjir dan lahar dingin pasca erupsi. Kolaborasi antara BPBD, pihak kehutanan, dan pemerintah desa mencerminkan pendekatan mitigasi yang bersifat lintas sektor dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana jangka panjang. Hal tersebut juga berkenaan dengan membangun masyarakat yang lebih siap dan Tangguh bencana.

3.1.2 Pelatihan

Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2025 mendefinisikan pelatihan penanggulangan bencana sebagai aktivitas peningkatan mutu, keahlian, dan keterampilan di bidang penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Flores Timur berkolaborasi dengan CRS melaksanakan berbagai bentuk pelatihan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi mitigasi non-struktural dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Anggota Kampung Siaga Bencana (KSB) juga memperoleh berbagai pelatihan terkait penanganan darurat bencana. Sebagaimana diungkapkan oleh Ambrosius Ila Tereng, anggota KSB, pelatihan yang diberikan meliputi mitigasi sebelum bencana, pemahaman risiko dan potensi ancaman, serta teknik penyelamatan dan evakuasi warga. Lebih lanjut, Maria Hendrika Tolok, anggota KSB, mengemukakan bahwa anggota KSB juga mendapatkan pelatihan pengelolaan lokasi pengungsian, seperti pendirian tenda, pengoperasian dapur umum, dan pengelolaan logistik bagi pengungsi.



Gambar 3. Pelatihan Kompetensi teknik penyelamatan dan evakuasi warga bagi anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB)

Sumber: Dokumen Kampung Siaga Bencana, 2024



Gambar 4. Pelatihan Pendirian Tenda

Sumber: Dokumen Kampung Siaga Bencana, 2024

Secara keseluruhan, pelatihan pengurangan risiko bencana pendekatan mitigasi non-struktural yang adaptif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, sekaligus sebagai upaya strategis dalam membangun kemandirian dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Namun, dari hasil penelitian, ditemukan bahwa BPBD Kabupaten Flores Timur belum mampu secara optimal menjalankan peran tersebut secara mandiri. Kondisi ini tercermin dari pelaksanaan pelatihan lebih banyak tergantung dan mengandalkan kehadiran Lembaga swasta, yakni Chatolic Relief Service (CRS), dibandingkan diinisiasi dan dilaksanakan secara langsung oleh BPBD selaku Lembaga pemerintah. Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia di internal BPBD serta tidak semua personel BPBD memiliki kompetensi teknis sebagai pelatih atau fasilitator kebencanaan yang terferifikasi, sehingga kemampuan Lembaga untuk menyelenggarakan pelatihan secara internal menjadi terbatas.

3.1.3 Infrastruktur

Infrastruktur bencana merupakan bagian dari sistem penanggulangan bencana yang mencakup sarana dan prasarana fisik untuk mendukung upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam konteks mitigasi dan kesiapsiagaan, infrastruktur yang dimaksud mencakup sistem peringatan dini (*early warning system*) serta rambu dan jalur evakuasi.

3.1.3.1 Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*)

Sistem peringatan dini merupakan pendekatan utama dalam pengelolaan risiko bencana yang bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap kehidupan manusia [5]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System/EWS*) di wilayah

rawan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki belum sepenuhnya terealisasi. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga BPBD belum dapat membangun sarana fisik seperti sirine atau alat peringatan dini lainnya. Sebagai alternatif, BPBD memanfaatkan grup WhatsApp “Salam Tangguh” sebagai media penyebaran informasi terkait perkembangan aktivitas gunung api kepada kepala desa, camat, pimpinan instansi, dan beberapa masyarakat yang tergabung dalam grup tersebut.

Petrus Muda Kurang, Kepala Desa Klatanlo, menyatakan bahwa pemerintah desa tetap berupaya menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui perangkat desa dan media komunikasi yang tersedia. Namun, sejumlah warga mengungkapkan bahwa penyampaian informasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti lokasi rumah warga yang jauh dari kantor desa dan keterbatasan mengakses media sosial.

Kualitas suara pengeras yang kurang jelas, serta keterbatasan masyarakat dalam mengakses media sosial dan telepon pintar. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sistem peringatan dini yang ada belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat secara merata, sehingga sebagian masyarakat masih bergantung pada informasi dari lingkungan sekitar ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dan akses informasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung efektivitas sistem peringatan dini di wilayah rawan bencana.

3.1.3.2 Rambu Jalur Evakuasi

BPBD Kabupaten Flores Timur telah memasang rambu dan jalur evakuasi di beberapa titik strategis sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. pemasangan rambu dilakukan untuk memberikan petunjuk arah kepada masyarakat agar dapat melakukan evakuasi secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat bencana. Keberadaan rambu jalur evakuasi diharapkan dapat membantu masyarakat menemukan jalur penyelamatan menuju lokasi yang lebih aman.

Dominikus Pati Leba mengungkapkan bahwa masyarakat mengaku belum memperoleh penjelasan maupun sosialisasi mengenai fungsi dan penggunaan rambu jalur evakuasi tersebut. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara penyediaan infrastruktur fisik dan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatannya. Meskipun rambu telah tersedia, kurangnya penyuluhan menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami arti dan fungsi rambu dalam situasi darurat. Oleh karena itu, pemasangan rambu jalur evakuasi perlu disertai dengan kegiatan sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan jalur evakuasi secara optimal saat terjadi bencana.

3.2 Tanggap Darurat

Tanggap Darurat Bencana adalah “serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan (damage and needs assessment), penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan, dan pembersihan lokasi bencana” [7].

3.2.1 Koordinasi Evakuasi

Koordinasi evakuasi dalam penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dilakukan melalui kerja sama antara BPBD, pemerintah desa, TNI, kepolisian, Tim SAR, Basarnas, serta instansi terkait lainnya. Maria Avelina M. Hallan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Flores Timur, menyatakan bahwa setelah menerima informasi terjadinya erupsi, pimpinan BPBD segera mengarahkan seluruh personel untuk melakukan respons darurat dengan mengerahkan tim pencarian dan pertolongan, Tim Reaksi Cepat, serta unsur instansi terkait ke wilayah terdampak seperti Desa Klatanlo dan Desa Hokeng Jaya untuk melakukan evakuasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme tanggap darurat dilakukan melalui komando terpusat dan koordinasi lintas sektor sehingga pengerahan personel dan sumber daya dapat dilakukan secara cepat dan terorganisir. Pendekatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan keselamatan masyarakat pada fase awal bencana.

Polikarpus Pati Niron, Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, menambahkan bahwa proses evakuasi dilakukan bersama kepolisian, Tim SAR, dan Basarnas dengan fokus pada penyelamatan masyarakat, pelajar, serta penanganan korban luka. Korban yang mengalami luka langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, sedangkan proses evakuasi korban meninggal dilakukan dengan menunggu tim khusus dari Basarnas. Hal ini menunjukkan bahwa proses evakuasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan sosial masyarakat. Dalam beberapa situasi, terdapat keluarga korban yang enggan dievakuasi sebelum korban lain ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan komunikasi persuasif dari petugas sangat penting dalam meyakinkan masyarakat agar mengikuti arahan evakuasi demi keselamatan bersama, terutama karena adanya potensi erupsi susulan.



Gambar 5. Proses evakuasi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki oleh BPBD Bersama Tim SAR, Basarnas, Kepolisian dan TNI
Sumber: Dokumen BPBD, 2024

Dalam pelaksanaannya, koordinasi evakuasi juga menghadapi tantangan terkait kondisi masyarakat yang berpencar ke berbagai wilayah untuk menyelamatkan diri. Petrus Muda Kurang, Kepala Desa Klatanlo, menyatakan bahwa pemerintah desa mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan dan pemantauan masyarakat yang mengungsi ke luar wilayah desa. Sementara itu, Gabriel Bala Namang, Kepala Desa Hokeng Jaya, mengemukakan bahwa pemerintah desa memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi untuk mengetahui keberadaan masyarakat yang mengungsi di lokasi lain. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemanfaatan media sosial dan koordinasi antara pemerintah desa dengan BPBD menjadi strategi penting dalam mendukung pendataan pengungsi dan memastikan keselamatan masyarakat selama masa tanggap darurat bencana.

3.2.2 Logistik Darurat

Pengelolaan logistik darurat pada saat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Logistik yang disalurkan meliputi bahan pangan, air bersih, perlengkapan tidur, pakaian, tenda pengungsian, serta kebutuhan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Penyaluran bantuan dilakukan melalui posko pengungsian dan dikoordinasikan bersama pemerintah desa, TNI, kepolisian, serta relawan kebencanaan agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan logistik menjadi prioritas utama dalam fase tanggap darurat karena berperan penting dalam menjaga kondisi fisik dan kesehatan masyarakat yang berada di lokasi pengungsian. Selain itu, koordinasi lintas sektor dalam penyaluran bantuan membantu mengurangi potensi tumpang tindih distribusi logistik dan memastikan kebutuhan kelompok rentan dapat terpenuhi dengan baik.

Selain penyaluran bantuan, BPBD Kabupaten Flores Timur juga telah mempersiapkan kebutuhan logistik melalui buffer stock yang tersedia di gudang logistik BPBD. Polikarpus Pati Niron, Staf Logistik BPBD, menjelaskan bahwa persediaan buffer stock digunakan sebagai langkah awal untuk merespons

kebutuhan masyarakat terdampak pada fase awal bencana sebelum bantuan dari pemerintah pusat tiba di lokasi bencana. Keberadaan cadangan logistik daerah terbukti sangat penting dalam mendukung operasional dapur umum dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara cepat. Akan tetapi, kapasitas logistik daerah masih memiliki keterbatasan apabila bencana terjadi dalam skala besar dengan jumlah pengungsi yang tinggi, sehingga dukungan logistik dari pemerintah pusat tetap menjadi komponen penting dalam menjaga keberlanjutan bantuan bagi masyarakat terdampak.

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh masyarakat terdampak menempati posko atau tenda pengungsian yang telah disediakan. Maria Avelina M. Hallan menambahkan bahwa sebagian masyarakat memilih melakukan pengungsian secara mandiri di rumah keluarga, kerabat, maupun lokasi lain yang dianggap aman. Oleh karena itu, BPBD bersama pemerintah desa melakukan pendataan terhadap masyarakat yang mengungsi secara mandiri beserta lokasi pengungsian sebagai dasar dalam proses penyaluran bantuan logistik. Upaya tersebut mencerminkan bahwa pendataan pengungsi mandiri menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap memperoleh bantuan logistik secara merata, baik yang berada di posko pengungsian maupun yang tinggal di luar posko. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan logistik darurat tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga pada ketepatan sasaran dan pemerataan pelayanan kepada seluruh masyarakat terdampak bencana.



Gambar 6. Penyaluran bantuan oleh BPBD kepada pengungsi mandiri kelompok rentan melalui pemerintah setempat

Sumber: Dokumen BPBD, 2025

3.3 Pemulihan

Pemulihan pascabencana adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak agar berfungsi Kembali normal [9]. Fokus utamanya mencakup dua fase yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi.

3.3.1 Rehabilitasi

Rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki difokuskan pada pemulihan dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Nasarius Gomes Lamanepa, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Flores Timur, menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan adalah pendataan dan identifikasi kerusakan dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kecamatan, dan instansi terkait sebagai dasar penyusunan perencanaan anggaran dan pelaksanaan program rekonstruksi. Selain pendataan, perbaikan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama mengingat dampak kerusakan berupa jalan berlubang, tertutup material vulkanik, dan terhambatnya akses akibat pohon tumbang. Penanganan dilakukan secara kolaboratif oleh BPBD bersama TNI,

kepolisian, Basarnas, dan relawan guna memulihkan mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi bantuan pascabencana.



Gambar 7. BPBD melakukan identifikasi kerusakan dan kerugian dalam rangka pendataan dampak bencana

Sumber: Dokumen BPBD , 2024

Sementara itu, rehabilitasi pascabencana difokuskan pada pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat seperti kegiatan hiburan dan kebersamaan untuk mengurangi tekanan psikologis masyarakat pascaerupsi. Di sisi ekonomi, Alfonsus Klasa Soge, Kepala Desa Boru, mengemukakan bahwa pemerintah desa mendistribusikan bibit sayuran kepada masyarakat di hunian sementara sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi sederhana sekaligus mengurangi kejenuhan selama masa pemulihan. Dengan demikian, rehabilitasi pascabencana dilakukan melalui pendekatan psikososial dan pemberdayaan ekonomi untuk mendukung pemulihan masyarakat secara bertahap.



Gambar 8. bantuan bibit sayuran dari Pemerintah Desa Boru kepada masyarakat yang tinggal di Huntara

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

3.3.2 Rekonstruksi

Rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dilakukan melalui penataan kembali kawasan permukiman dan relokasi masyarakat dari wilayah rawan bencana ke lokasi yang lebih aman. Nasarius Gomes Lamanepa, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Flores Timur, menjelaskan bahwa relokasi masyarakat dari Kawasan Rawan Bencana (KRB) dilakukan sebagai langkah perlindungan jangka panjang untuk menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman erupsi susulan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa relokasi tidak hanya dimaknai sebagai pemindahan tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari upaya rekonstruksi yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana di masa mendatang. Kebijakan relokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan serta rekomendasi teknis terkait tingkat kerawanan wilayah terdampak bencana.



Gambar 9. Sosialisas Bersama Pemerintah Daerah, BPBD dan Kepala Desa terkait rencana relokasi masyarakat

Sumber: Dokumen BPBD, 2024

BNPB Bersama dengan Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD Kabupaten Flores Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga menyediakan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak bencana. Pembangunan huntara dilakukan agar masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan layak selama proses pembangunan hunian tetap berlangsung. Keberadaan huntara tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial masyarakat agar tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal tanpa kembali menetap di kawasan rawan bencana. Dengan demikian, penyediaan huntara menjadi bagian penting dalam mendukung proses rekonstruksi yang aman dan berkelanjutan. Di sisi lain, tidak semua warga terdampak memilih untuk menempati hunian sementara yang telah disediakan. Sebagian warga memilih untuk tidak memanfaatkan skema hunian sementara dengan berbagai pertimbangan, seperti memilih tinggal bersama keluarga atau saudara di luar zona terdampak, atau memiliki tempat tinggal alternatif yang dapat mereka gunakan sementara waktu. Bagi kelompok warga ini, pemerintah menyediakan skema bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) sebagai bentuk dukungan finansial selama masa menunggu proses pembangunan hunian tetap selesai dilaksanakan.



Gambar 10. Hunian sementara (huntara) bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Bernadete Nogo Pukay, salah seorang warga terdampak bencana, mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat merasa keberatan untuk direlokasi karena memiliki keterikatan dengan tempat tinggal lama dan sumber mata pencaharian yang berada di sekitar wilayah tersebut. Namun, pengalaman

erupsi yang menimbulkan korban jiwa membuat masyarakat mulai menyadari pentingnya relokasi demi keselamatan. Kesadaran tersebut mencerminkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap relokasi dipengaruhi oleh meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana. Selain itu, masyarakat juga berharap lokasi relokasi tetap memiliki akses yang baik terhadap lahan pertanian, jalan, dan ketersediaan air bersih agar keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi mereka tetap terjaga.

Sementara itu, Gabriel Bala Namang, Kepala Desa Hokeng Jaya, mengemukakan bahwa proses relokasi dilakukan melalui pendekatan persuasif karena sebagian besar masyarakat memiliki keterikatan yang kuat dengan tempat tinggal lama dan lahan pertanian mereka. Pemerintah desa berupaya memberikan pemahaman secara bertahap bahwa relokasi dilakukan untuk melindungi keselamatan masyarakat, sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat mengakses lahan pertanian mereka tanpa harus menetap di kawasan rawan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan relokasi sangat bergantung pada komunikasi risiko, pendekatan sosial, dan kemampuan pemerintah dalam menjembatani kebutuhan keselamatan serta keberlanjutan ekonomi masyarakat terdampak bencana

3.4 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Peran Bpbd Kabupaten Flores Timur

3.4.1 Faktor Pendukung

3.4.1.1 Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor antara BPBD dan berbagai instansi meliputi pemerintah desa, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan relawan menjadi faktor pendukung utama dalam penanggulangan bencana. Koordinasi ini berlangsung sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan, mencakup evakuasi, pendirian posko, penyediaan logistik, dan penanganan dampak lanjutan. Pembagian tugas yang jelas antarinstansi terbukti mengurangi tumpang tindih kewenangan, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efektivitas penanganan secara keseluruhan.

3.4.1.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Kesiapan sarana dan prasarana pendukung, meliputi posko pengungsian, tenda, dapur umum, serta logistik dasar seperti bahan pangan, air minum, dan perlengkapan harian, berkontribusi signifikan terhadap kelancaran operasional tanggap darurat. Fasilitas tersebut memungkinkan proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak berjalan lebih cepat, terorganisir, dan terkoordinasi.

3.4.1.3 Pemanfaatan Sistem Komunikasi dan Media Informasi

Pemanfaatan media sosial, komunikasi melalui perangkat desa, dan penyampaian informasi langsung di posko turut mendukung penyebaran informasi kebencanaan secara cepat dan akurat. Sistem komunikasi juga berperan dalam koordinasi antarinstansi di lapangan, sehingga kondisi wilayah terdampak dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara responsif. Meskipun terdapat keterbatasan jangkauan pada sebagian wilayah, keberadaan sistem ini tetap mempercepat arus informasi selama penanganan bencana.

3.4.1.4 Dukungan Pemerintah Pusat dan Pihak Eksternal

Dukungan pemerintah pusat berupa bantuan logistik, pendanaan, dan pendampingan teknis memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana berskala besar. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal seperti Catholic Relief Services (CRS) turut berkontribusi melalui pendampingan masyarakat, pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), serta penguatan kesiapsiagaan di tingkat desa. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga eksternal memungkinkan penanganan bencana dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3.4.2 Faktor Penghambat

3.4.2.1 Keterbatasan Anggaran

Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi peran BPBD Kabupaten Flores Timur dalam pelaksanaan mitigasi bencana adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan dana berdampak pada pelaksanaan sosialisasi, pelatihan kebencanaan, pengadaan infrastruktur mitigasi, serta peningkatan kapasitas relawan dan anggota Kampung Siaga Bencana (KSB). Yohanes Bergmans Pole Hayon, Kepala Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Flores Timur, menyatakan bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan masih sangat terbatas sehingga BPBD tidak dapat melibatkan masyarakat secara luas dalam setiap kegiatan kebencanaan. Keterbatasan tersebut mengakibatkan kegiatan mitigasi lebih banyak difokuskan kepada perangkat desa atau kelompok tertentu sebagai perwakilan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana dan langkah mitigasi yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

3.4.2.2 Keterbatasan Jangkauan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Kegiatan sosialisasi kebencanaan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mario Theodorus Dedong, anggota KSB, mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi lanjutan lebih banyak melibatkan perangkat desa sehingga tidak semua masyarakat memperoleh informasi secara langsung. Hal serupa juga disampaikan oleh Martha F. Mau dan Anastasia Maryati yang menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi hanya diketahui oleh kelompok tertentu, bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme penyampaian informasi dari anggota KSB kepada masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga informasi kebencanaan cenderung berhenti pada kelompok tertentu saja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara memadai.

3.4.2.3 Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat terhadap Risiko Bencana

Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana juga menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan bencana. Yohanes Bergmans Pole Hayon menyatakan bahwa masih terdapat masyarakat yang bersikap kurang peduli terhadap ancaman bencana dan baru merasa takut ketika melihat dampak secara langsung. Sementara itu, Petrus Muda Kurang, Kepala Desa Klatanlo, menambahkan bahwa sebagian masyarakat bahkan menganggap informasi kebencanaan sebagai hoaks sehingga tidak sepenuhnya mematuhi imbauan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rendahnya persepsi risiko dan munculnya ketidakpercayaan terhadap informasi resmi menyebabkan masyarakat cenderung menunda evakuasi dan menganggap aktivitas gunung sebagai kondisi yang biasa terjadi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko korban jiwa karena masyarakat tidak melakukan tindakan mitigasi secara dini.

3.4.2.4 Rendahnya Kesiediaan Masyarakat untuk Relokasi ke Hunian Sementara

Masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih tetap tinggal di kawasan rawan bencana dan belum bersedia menempati hunian sementara (huntara) yang telah disiapkan pemerintah. Sisilia Oni Woni, warga Dusun Podor, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan jarak huntara dari lahan pertanian menjadi alasan utama masyarakat tetap bertahan di lokasi lama. Senada dengan hal tersebut, Yanto Boruk dan Benediktus B. Liwu menyatakan bahwa masyarakat merasa kondisi wilayah mereka masih aman serta tetap ingin melakukan aktivitas di kebun untuk menjaga penghasilan dan kesehatan fisik. Berbagai alasan tersebut mencerminkan bahwa keputusan masyarakat untuk tidak relokasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, persepsi risiko yang rendah, serta keterikatan terhadap aktivitas dan lingkungan tempat tinggal mereka.

Yohanes Bergmans Pole Hayon dan Alfonsus Klasa Soge, Kepala Desa Boru, mengemukakan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan persuasif melalui imbauan kepada masyarakat agar bersedia pindah ke huntara demi keselamatan jiwa. Namun, pemerintah tidak melakukan pemaksaan dan tetap menghormati keputusan masyarakat terkait tempat tinggal mereka. Situasi ini memperlihatkan adanya dilema antara kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana dan hak masyarakat dalam menentukan pilihan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih menekankan pada edukasi, peningkatan kesadaran risiko, dan pentingnya keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam situasi kebencanaan.

4. KESIMPULAN

Peran BPBD Kabupaten Flores Timur dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki tercermin pada tahap mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan. Pada tahap mitigasi, sosialisasi dan pelatihan kebencanaan masih sangat bergantung pada dukungan lembaga eksternal seperti Catholic Relief Services (CRS) akibat terbatasnya kapasitas sumber daya manusia internal BPBD. Infrastruktur sistem peringatan dini belum terealisasi secara fisik karena keterbatasan anggaran, sehingga BPBD masih mengandalkan grup WhatsApp sebagai alternatif, sementara rambu jalur evakuasi yang sudah terpasang belum disertai sosialisasi yang memadai.

Pada tahap tanggap darurat, BPBD menunjukkan koordinasi lintas sektor yang baik bersama TNI, kepolisian, Basarnas, dan pemerintah desa dalam proses evakuasi serta penyaluran logistik darurat. Pada tahap pemulihan, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, pendekatan psikososial, pemberdayaan ekonomi sederhana, serta relokasi ke hunian sementara, meskipun sebagian masyarakat belum bersedia direlokasi karena faktor ekonomi dan keterikatan terhadap lahan. Secara keseluruhan, efektivitas peran BPBD didukung oleh koordinasi lintas sektor dan dukungan pihak eksternal, namun masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, jangkauan sosialisasi yang belum merata, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana.

REFERENSI

- [1] Ashari, A., dan Purwantara, S. (2022). *Bentang Lahan Vulkanik Indonesia: Apek Fiskal dan Kultural*. UNY Press, Yogyakarta.
- [2] Black, J. A., dan Champion, D. J. (2009). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Refika Aditama
- [3] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- [4] Dewi Fitriani, I., Zulkarnaen, W., Bagianto, A., Muhammadiyah Bandung, S., & Muhammadiyah Bandung, U. (2021). *Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Di Jawa Barat*. 5(1), 2021.
- [5] Jamroni, R (2024). *Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dalam Mengurangi Risiko Bencana: Tinjauan Konsep, Impelemntasi, dan Contoh Kasus di Berbagai Negara*. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar.
- [6] Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- [7] Ramli, S. (2011). *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management)*. Dian Rakyat, Jakarta.
- [8] Sugiyono, (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- [9] Surtiari G. A. K (2019). *Pentingnya Penanganan Pascabencana ysng Berfokus Pada Penduduk untuk Mewujudkan Build Back Better: Pembelajaran dari Bencana Palu, Sigi dan Donggala*. Jurnal Kependudukan Indonesia , 14(2), 165-184.
- [10] Tsabita N. T.. dan Santoso, S. A. (2024). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahap Pra Bencana Erupsi Gunung Merapi (Studi di Kawasan Rawan Bencana III Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten)*. Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 4 (1), 195-206.
- [11] Wijayanto, W. (2021). *Peta Ring Of Fire Serta Penanggulangan Bencana Gunung Api*. Rizki Aulia, Gresik.

- [12] Yustriningrum, E., Sinaga, L. C., Yuliyanti, R., dan Andriana, N. (2016). Bencana Alam, Kerentanan dan Kebijakan di Indonesia; Studi Kasus Gempa Padang dan Tsunami Mentawai. Calpulis, Yogyakarta